

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Asal mula aliansi Jepang-Amerika Serikat dapat ditelusuri kembali ke masa setelah Perang Dunia II ketika Jepang mengalami kekalahan pada tanggal 15 Agustus 1945, yang menandakan berakhirnya perang. Penyerahan tanpa syarat Jepang dipicu oleh tekanan militer Amerika Serikat dan Tiongkok yang kuat. Setelah momen penting ini, kedua negara memulai proses pembentukan aliansi, membina kerja sama, dan berusaha untuk membangun hubungan yang lebih positif dan konstruktif untuk masa depan.

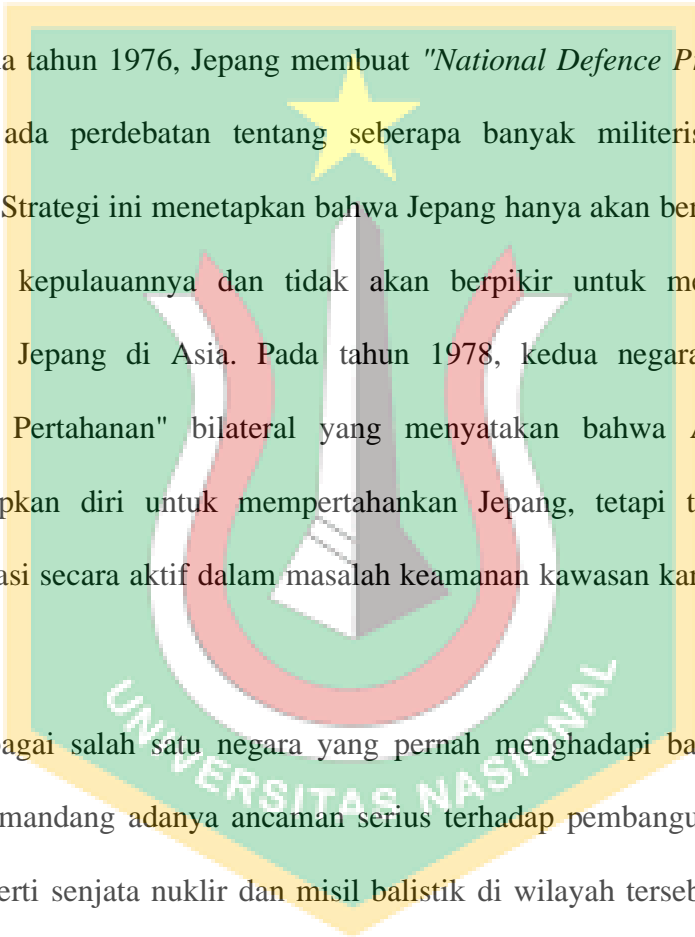
Pada tanggal 8 September 1951, dimulailah aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang melalui penandatanganan Perjanjian Keamanan AS-Jepang. Berdasarkan perjanjian ini, Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan nasional Jepang. Pemerintahan yang dipimpin oleh Nobusuke Kishi pada waktu itu menginginkan revisi perjanjian tersebut untuk memperbaiki kesalahan dan menegaskan kedaulatan Jepang. Setelah revisi, peran militer Amerika Serikat berubah, dan mereka hanya akan berintervensi ketika keamanan Jepang benar-benar terancam. Meskipun Amerika Serikat masih dapat mempertahankan basis militernya di Jepang, tanggung jawab utama untuk keamanan nasional Jepang dialihkan ke Pasukan Pertahanan Diri Jepang yang didirikan pada tahun 1954. Ini merupakan revisi pertama sejak perjanjian antara Jepang dan Amerika Serikat dibuat pada tahun 1960.

Selama tahun 1960-an, Jepang menyaksikan kebangkitan ekonomi yang luar biasa setelah kemerosotan pasca perang. Selama periode ini, Jepang mulai mengungkapkan kekhawatiran mengenai kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan posisinya di tengah-tengah kekuatan Vietnam Utara yang terus meningkat, terutama yang terlihat jelas selama Serangan Tet pada tahun 1968. Menanggapi kekhawatiran ini, Presiden AS pada saat itu, Richard Nixon, memperkenalkan "Doktrin Guam", yang mendesak sekutu Asia untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam upaya pertahanan mereka.

Para pemimpin Jepang melihat situasi ini sebagai peluang untuk menjadikan negara mereka sebagai pilar pertahanan melawan komunisme. Mereka setuju untuk meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanan agar dapat berperan aktif dalam pertahanan di kawasan Asia. Selain itu, mereka mendorong pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan penggandaan anggaran pertahanan dan bahkan mengembangkan senjata nuklir.

Selama tahun 1960-an, ekonomi Jepang mengalami pemulihan setelah kemerosotan pasca perang. Selama periode ini, Jepang mulai mempertanyakan kapasitas Amerika Serikat dalam menangani kemunculan Vietnam Utara, terutama yang disorot oleh Serangan Tet pada tahun 1968. Sebagai tanggapan, Presiden AS saat itu, Richard Nixon, memperkenalkan "Doktrin Guam", yang menyerukan agar sekutu Asia mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam tindakan pertahanan mereka. Hal ini memberikan peluang bagi politisi Jepang yang bertujuan untuk memposisikan negara mereka sebagai penyeimbang komunisme. Akibatnya, ada konsensus di antara para politisi Jepang ini bahwa negara mereka harus

meningkatkan anggarannya secara substansial untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menegakkan keamanan di Asia. Selain itu, mereka bahkan mempertimbangkan kemungkinan mengembangkan senjata nuklir, selain menggandakan anggaran pertahanan, untuk lebih meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang.<sup>1</sup>



Pada tahun 1976, Jepang membuat "*National Defence Program Outline*", meskipun ada perdebatan tentang seberapa banyak militerisasi yang harus dilakukan. Strategi ini menetapkan bahwa Jepang hanya akan berkonsentrasi pada pertahanan kepulauannya dan tidak akan berpikir untuk memperluas peran pertahanan Jepang di Asia. Pada tahun 1978, kedua negara sepakat dalam "Pedoman Pertahanan" bilateral yang menyatakan bahwa Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk mempertahankan Jepang, tetapi tidak siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam masalah keamanan kawasan karena prinsip pasif Jepang.

Sebagai salah satu negara yang pernah menghadapi bahaya bom atom, Jepang memandang adanya ancaman serius terhadap pembangunan kemampuan militer seperti senjata nuklir dan misil balistik di wilayah tersebut. Dampak dari ancaman ini bisa mengganggu stabilitas regional, oleh karena itu, Jepang berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan memperkuat hubungan internasional sebagai fondasi keamanan nasional. Pendekatan ini mencakup tiga

---

<sup>1</sup> Green, M. J. (2007). The U.S Japan Alliance: A brief Strategic History. Education About Asia, 12(3), 25-30.

poin utama: stabilisasi kehidupan rakyat, pengembangan kemampuan pertahanan, dan peningkatan kerjasama dengan Amerika Serikat. Jepang juga menerapkan kebijakan pertahanan eksklusif, yaitu menolak menjadi kekuatan militer yang membahayakan dunia, dengan tidak mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, mereka meningkatkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan memperkuat kapabilitas pertahanan di luar wilayah mereka.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Asia Timur tetap menjadi salah satu daerah di dunia yang hubungan internasionalnya terus mengalami ketidakstabilan. Terdapat berbagai masalah politik, baik lama maupun baru, di kawasan ini yang sangat sensitif, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam situasinya. Salah satu isu politik baru adalah meningkatnya sikap agresif dari China, terutama terkait klaim wilayah kepulauan Sparty dan Paracel, serta tindakan-tindakan yang diambilnya di Laut China Selatan. Sementara itu, masalah lama yang telah berlangsung lama, seperti konflik dan ancaman keamanan di Semenanjung Korea, terus menjadi kompleksitas dalam politik regional di daerah tersebut.<sup>2</sup>

Meningkatnya program nuklir Korea Utara semakin meningkatkan kekhawatiran dan mengancam stabilitas di wilayah Asia Timur, yang menyebabkan tegangan politik di kawasan tersebut menjadi sangat tinggi. Masalah ini terutama terfokus pada Semenanjung Korea. Sebenarnya, permasalahan nuklir ini telah dimulai sejak awal tahun 1990 sebagai upaya rezim Korea Utara untuk menjauhkan diri dari pengaruh Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat telah menganggap

---

<sup>2</sup> Abdul Irsan. 2007. Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia, Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu. hal. 198.

Korea Utara sebagai negara pendukung terorisme.<sup>3</sup> Alasan lainnya adalah bahwa dengan memiliki senjata nuklir, Korea Utara akan mendapatkan posisi tawar yang kuat sebagai alat negosiasi. Mereka berharap bahwa dengan fakta yang diketahui dunia internasional tentang program nuklir mereka, mereka dapat memperbaiki hubungan mereka dengan Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Korea Utara percaya bahwa dengan memiliki senjata nuklir, mereka akan mampu mempertahankan kekuasaan rezimnya dan mengurangi kekuatan hegemoni Amerika Serikat di wilayah tersebut. Mereka juga percaya bahwa memiliki senjata nuklir akan mendatangkan bantuan ekonomi di tengah perekonomian Korea Utara yang sedang menurun.<sup>5</sup>

Dalam lanskap hubungan internasional yang penuh gejolak, negara-negara harus menjalin aliansi yang kuat untuk menjaga keamanan mereka dan mendukung satu sama lain. Salah satu aliansi yang bertahan lama dan mapan adalah kemitraan antara Jepang dan Amerika Serikat, yang bermula setelah berakhirnya Perang Dunia II dan penandatanganan perjanjian perdamaian pada tahun 1951. Seiring berjalannya waktu, dalam menanggapi kompleksitas tantangan global, aliansi ini telah tumbuh lebih kuat dan lebih tahan lama. Kekuatan aliansi Jepang-Amerika Serikat terlihat jelas melalui berbagai bentuk kerja sama yang mencakup bidang ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan. Tonggak penting yang menunjukkan

---

<sup>3</sup> Baca, East Asian Strategic Review 2001. Japan: The National Institute for Defence Studies. hal. 142- 143

<sup>4</sup> East Asian Strategic Review 2003, Japan: The National Institute for Defence Studies hal. 33

<sup>5</sup> Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin, Zuhri, Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional - Spektrum Vol. 7, No. 2, Juni 2010, hal. 8-9

kedekatan aliansi ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan pada tahun 1960. Sejak saat itu, pertukaran informasi dan kolaborasi di bidang pertahanan dan keamanan terus berkembang, dengan kemajuan lebih lanjut yang dicapai melalui pedoman yang disepakati pada tahun 2015.

Namun demikian, penting untuk mengakui bahwa aliansi Jepang-AS dapat saling menguntungkan, selama aliansi ini tidak terganggu oleh elemen eksternal yang dapat menimbulkan risiko. Salah satu faktor luar yang berpotensi mempengaruhi aliansi Jepang-Amerika adalah konflik yang terus berlanjut di Semenanjung Korea. Konflik ini bermula ketika Korea Utara menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada tanggal 10 Januari 2003, dan kemudian melakukan pengembangan senjata nuklir secara mandiri. Situasi semakin memanas ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir perdananya pada bulan Oktober 2006, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.

Pengejaran senjata nuklir Korea Utara yang agresif telah menimbulkan kekhawatiran tidak hanya bagi Korea Selatan, mengingat kedekatan geografisnya, tetapi juga bagi Jepang dan Amerika Serikat dan aliansi mereka masing-masing. Pada bulan Februari dan Maret 2017, Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik KN-11 dan meluncurkan lima rudal di atas Laut Jepang, melakukan tindakan provokatif yang menimbulkan ancaman langsung ke wilayah tersebut. Selain itu, pengabaian Korea Utara terhadap perjanjian perlindungan dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang merupakan persyaratan untuk menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), semakin meningkatkan

ketegangan dan dipandang sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Situasi ini tetap tegang hingga Juni 2016, ketika Korea Utara secara eksplisit mengancam akan melakukan serangan ke wilayah Pasifik Amerika, yang secara khusus menargetkan Guam. Tindakan ini secara signifikan meningkatkan potensi konflik dan menambah kompleksitas situasi yang dihadapi oleh Jepang, Amerika Serikat, dan aliansinya.

Aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat dapat menghadapi kerentanan dan ketidakstabilan dalam situasi yang mengancam kedua negara. Hal ini terbukti setelah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 9 September 2016, menanggapi tindakan provokatif dan ancaman uji coba senjata nuklir Korea Utara. Demikian pula, pada tanggal 2 Desember 2016, Jepang juga menyatakan keprihatinannya atas kepemilikan dan uji coba senjata nuklir Korea Utara yang dianggap sebagai ancaman langsung tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

Dengan adanya kekhawatiran bersama ini, Jepang dan Amerika Serikat mengandalkan dukungan satu sama lain untuk mempertahankan kekuatan aliansi mereka. Pertemuan bilateral penting yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2017, memainkan peran penting dalam memperkuat kemitraan mereka dan memajukan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan tersebut membahas berbagai topik, termasuk hubungan ekonomi, maritim, dan teknologi siber, dengan penekanan khusus pada penanganan pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Menanggapi meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara, Jepang dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut untuk menangani masalah ini dengan cara yang hati-hati. Mereka mengakui meningkatnya bahaya yang ditimbulkan oleh pengembangan senjata nuklir Korea Utara terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Untuk mengatasi tantangan ini, kedua negara berjanji untuk saling melindungi satu sama lain melalui kerja sama pertahanan dan berkomitmen untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya bersama ini bertujuan untuk mengatasi ancaman yang meningkat dan memastikan keamanan dan stabilitas kawasan.

Dilihat dari cakupan isu yang dibahas, Japan-US Agreement sendiri dijadikan acuan bagi Jepang dan AS dalam pelaksanaan kerjasama pertahanan pada masalah kerjasama, kawasan Asia-Pasifik dan potensi konflik di Semenanjung Korea. Semenanjung Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk memperkuat kejujuran dan rasa saling percaya dalam aliansi Jepang-Amerika. Untuk memastikan negara yang stabil dan damai di kawasan Asia-Pasifik.

Penulis mengeksplorasi kelangsungan jangka panjang aliansi Jepang-AS dalam menghadapi potensi konflik di Semenanjung Korea dengan menggunakan gagasan Diplomasi Pertahanan. Konsep ini berkaitan dengan interaksi militer antar negara dengan tujuan akhir untuk mempromosikan perdamaian. Diplomasi Pertahanan mencakup berbagai kegiatan bilateral dan multilateral yang difokuskan pada pertahanan strategis dan memperkuat keamanan nasional suatu negara.



Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, penelitian yang diusulkan oleh penulis berpusat pada pentingnya mempertahankan kemitraan strategis antara Jepang dan Amerika Serikat melalui Aliansi Jepang-AS, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan dan juga konsep *Nuclear Deterrence* sebagai kerangka analisis untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan strategis kedua negara ini dapat terus bertahan dan mempertahankan aliansi mereka menghadapi ancaman dari Korea Utara. Penelitian ini akan berjudul “*Japan – U.S. Alliance dalam Merespon Agresivitas Korea Utara Mengenai Pengembangan Senjata Nuklir Pada Tahun 2013-2018*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seperti yang telah dijelaskan dalam informasi latar belakang, inti dari masalah ini berasal dari agresi Korea Utara dalam konflik Semenanjung Korea. Pengerjaan senjata nuklir yang agresif tidak hanya menimbulkan ancaman keamanan bagi Korea Selatan, negara yang secara geografis paling dekat, tetapi juga membahayakan keamanan Jepang dan Amerika Serikat, yang berakibat terpengaruhnya aliansi antara kedua negara ini.

Hal ini dapat diamati melalui uji coba rudal balistik KN-11 Korea Utara, yang berlangsung pada bulan Februari dan diperpanjang hingga Maret 2017. Dalam periode ini, Korea Utara meluncurkan lima rudal yang melintasi Laut Jepang, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar karena sifatnya yang provokatif. Selain itu, tindakan Korea Utara lainnya yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat juga mengkhawatirkan. Dengan tidak mematuhi perjanjian

keamanan dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang merupakan prasyarat keanggotaan NPT, perilaku mencurigakan Korea Utara dianggap sebagai ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. Ancaman ini terus berlanjut hingga Juni 2016 ketika Korea Utara secara resmi mengumumkan niatnya untuk menyerang wilayah Pasifik Amerika, secara khusus menargetkan Guam.

Berdasarkan hal tersebut maka pernyataan penelitian ini adalah Bagaimanakah Jepang merespon agresivitas Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan paparan masalah penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk lebih mengetahui hubungan strategis antara Jepang dan Amerika dalam kerangka *Japan-U.S. Alliance* dalam merespon pengembangan nuklir Korea Utara berdasarkan pendekatan konsep Diplomasi Pertahanan dan konsep Nuclear Deterrence.
2. Tujuan dari penelitian ini selanjutnya adalah untuk berkontribusi dalam pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang berarti bagi para pembacanya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat akademis, yaitu sebagai sarana untuk memberikan pemahaman mengenai teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep Diplomasi Pertahanan dan konsep Nuclear Deterrence. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan mengenai ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Korea Utara, serta peran dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Jepang.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai landasan bagi segenap akademisi dan pembaca dalam memandang dan menanggapi pengembangan nuklir Korea Utara serta respon Jepang yang beraliansi dengan Amerika Serikat dalam menanggapi hal tersebut.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam membaca dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka diperlukan penyusunan penulisan yang sistematis yang merupakan pedoman dan kerangka dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab dalam penelitian ini dari mulai bab 1 sampai penutup. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai hal – hal yang menjadi penyebab masalah yang akan diteliti. Setelah gambaran awal dari permasalahan telah

teridentifikasi, maka penulis akan merumuskan pertanyaan–pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini beserta tujuan dan manfaatnya. Dan yang terakhir ada sistematika penulisan yang berisi penjelasan singkat mengenai isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu berguna sebagai pembandingan dan penulis akan menjabarkan perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Selanjutnya ada kerangka konsep yang akan menjadi pijakan utama dalam penelitian. Kerangka teori ataupun konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah konsep *Diplomasi Pertahanan*. Yang terakhir ada kerangka pemikiran yang penulis gunakan untuk membedah variabel–variabel yang akan dimasukkan dalam penelitian.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab tiga berisi tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Pendekatan penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memberitahukan bagaimana dan dengan cara apa data dikumpulkan. Data–data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dikembangkan berdasarkan teknik yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

#### **BAB IV : KONFLIK SEMENANJUNG KOREA YANG BERDAMPAK PADA HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA JEPANG DAN AMERIKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hubungan antara Jepang dan AS semenjak perang dunia II. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai sejarah konflik Korea serta implikasinya terhadap program nuklir Korea Utara serta Agresivitas Korea Utara dalam menguji coba senjata Rudal Balistik berbasis nuklir.

#### **BAB V : RESPON JEPANG DALAM MENANGGAPI PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana respon Jepang dalam menanggapi pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, serta upaya Jepang dalam mempertahankan hubungannya dengan Amerika Serikat melalui kerangka *Japan – U.S. Alliance*.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab enam berisi tentang kesimpulan berupa inti dari seluruh penjabaran dalam penelitian ini berdasarkan teori dan fakta yang ada dilapangan. Kesimpulan ini diambil dari keseluruhan bagian mulai dari bab satu sampai bab lima dan diakhiri dengan hasil dari pembahasan.